

Tinjauan yuridis terhadap pendaftaran perubahan sertifikat jaminan fidusia oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia propinsi Jawa Barat (study pelaksanaan pendaftaran perubahan sertifikat fidusia oleh kantor notaris XXX, SH, MKN, Notaris di Jakarta Selatan) = judicial review of the registration of the fiducia certificates amendment by the office at west java provincial office of the ministry of law and human rights of the republic of indonesia (case study about the implementation of the fiducia registration which conducted by notary office xxx s.h., mkn. notary at south jakarta)

Rusminiati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20306069&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas pendaftaran perubahan sertifikat fidusia atas perubahan nilai obyek fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Jawa Barat. Dimana dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan apabila terdapat perubahan sertifikat fidusia tidak diperlukan perubahan akta jaminan fidusia. Penulisan tesis ini difokuskan pada prosedur pelaksanaan pendaftaran fidusia di Propinsi Jawa Barat yang tidak sesuai dengan Undang-undang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data yang bersifat primer yaitu melalui wawancara dan sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian menyarankan bahwa Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan peraturan supaya terdapat keseragaman pendaftaran perubahan fidusia pada Kantor Wilayah seluruh Indonesia.

<hr>

ABSTRACT

This thesis discusses about the registration of the fiducia certificates amendment to change its object value through Fiducia Registration Office at West Java Provincial Office of the Ministry of Law and Human Rights. Pursuant to Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Facility, if the fiducia certificate is amended then it's not necessary to make a prior amendment on its deed. The thesis is focused on the implementation of the registration procedure in West Java Provincial Fiducia Registration Office which is not in accordance with the law of Fiduciary Facility. This research uses normative juridical approach. The data sources are taken from the primary data such as interview and the secondary data such as primary,

secondary and tertiary law material. The result of this research gives suggestion to the Ministry of law and Human Rights to issue a regulation in order to create uniformity at all Provincial Fiducia Registration Office throughout Indonesia.